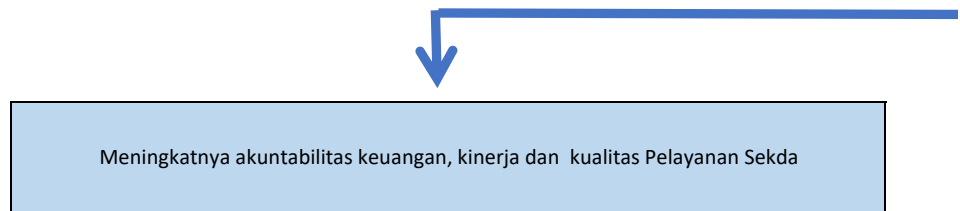
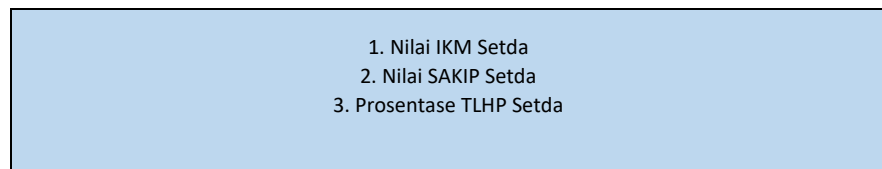


TUJUAN SEKDA

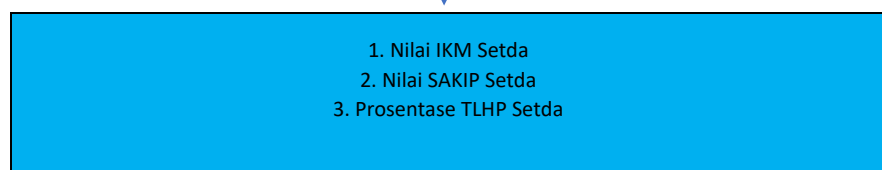
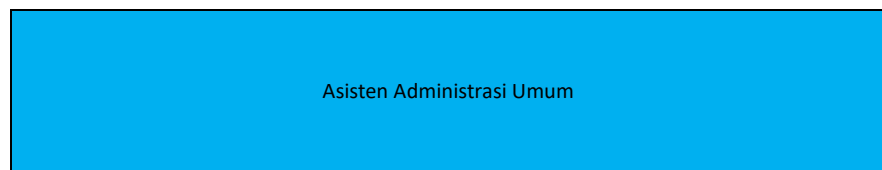
SASARAN SEKDA



indikator :



INDIKATOR ASISTEN



PROGRAM

Program Pelayanan Kesekretariatan

indikator :

1. Jumlah laporan kinerja yang baik dan tepat waktu
2. Presentase Tindak lanjut LHP
3. Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik
4. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
5. Jumlah pegawai yang memenuhi standart kompetensi

Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan

indikator :

1. Presentase Kegiatan serta Kebijakan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh Media Masa elektronik, cetak tingkat lokal, regional dan nasional
2. Presentase Kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang didokumentasikan
3. Presentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol

KEGIATAN

Pelayanan administrasi Perkantoran

indikator :

Jumlah surat menyurat yang diproses

Jumlah dokumen pelaporan asset

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Jumlah pegawai yang honorarium lemburnya dibayarkan tepat waktu

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah

indikator :

Presentase kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasikan

Fasilitasi Dokumentasi & Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah

indikator :

Presentase kegiatan Pimpinan Daerah yang didokumentasikan

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Jumlah ATK yang disediakan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

Jumlah Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayar

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

indikator :
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)

Pengelolaan Administrasi Keuangan

indikator :
Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

indikator :
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

Jumlah meubelair kantor

Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

Jumlah gedung / kantor yang direhab / diperlihara

Pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan daerah

indikator :
Presentase pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan Pimpinan Daerah

Jumlah sarana prasarana rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang diperlihara

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Jumlah seragam dan pakaian khusus aparatur di lingkungan sekretariat daerah

Peningkatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga di Lingkungan Setda dan Rumah Dinas

indikator :

Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang tersedia

Jumlah rumah jabatan/dinas yang diperlihara/direhab

Jumlah mebelair Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia

Jumlah peralatan rumah tangga Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia

Peningkatan Kapasitas SDM

indikator

Jumlah Aparatur yang mendapat Pelatihan/Bintek

Meningkatnya pengelolaan produk hukum dan Penyelesaian kasus hukum

indikator :

indikator :

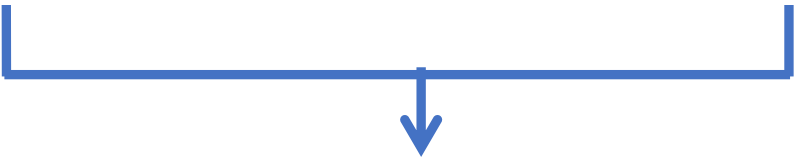
Presentase Produk Hukum daerah yang baik

Jumlah kasus Hukum yang selesai



Presentase Produk Hukum daerah yang baik

Jumlah kasus Hukum yang selesai



Program penataan peraturan perundang-undangan

indikator

1. Presentase produk hukum yang sesuai dengan syarat pembentukan

2. Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi perda

3. Presentase Kebijakan publik daerah yang diuji publikan dalam satu tahun

4. Presentase pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas



Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

indikator :

jumlah perkara / permasalahan hukum yang terselesaikan

jumlah perkara yang selesai dengan Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin

jumlah permasalahan yang terselesaikan dengan pertimbangan / konsultasi

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

indikator :



Tingkat Partisipasi warga dalam forum uji publik rencana kebijakan publik daerah

Jumlah draft Produk hukum Perda yang diproses

Jumlah draft Produk hukum Peraturan Walikota yang diproses

Jumlah produk hukum yang dilakukan analisis sinkronisasi

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

indikator :

Jumlah Kelurahan sadar hukum yang difasilitasi

Publikasi peraturan perundang-undangan

indikator :

jumlah perda yang diunggah dalam JDIH

Terwujudnya Birokrasi yang melayani, bersih dan a

indikator :

1. Nilai SAKIP
2. Hasil EKPPD
3. Index Reformasi Birokrasi

Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

indikator :

Nilai SAKIP

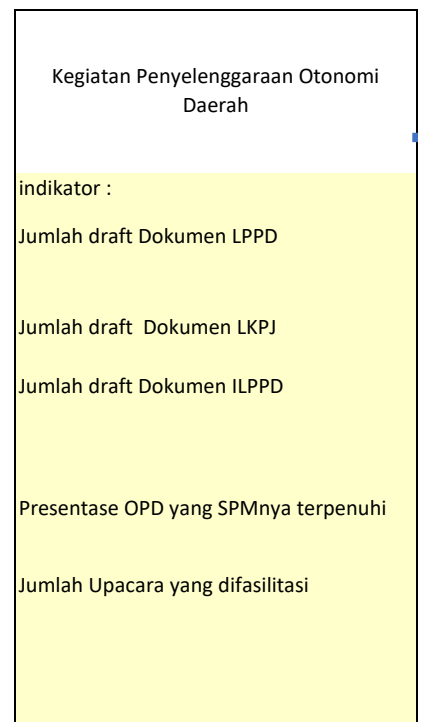
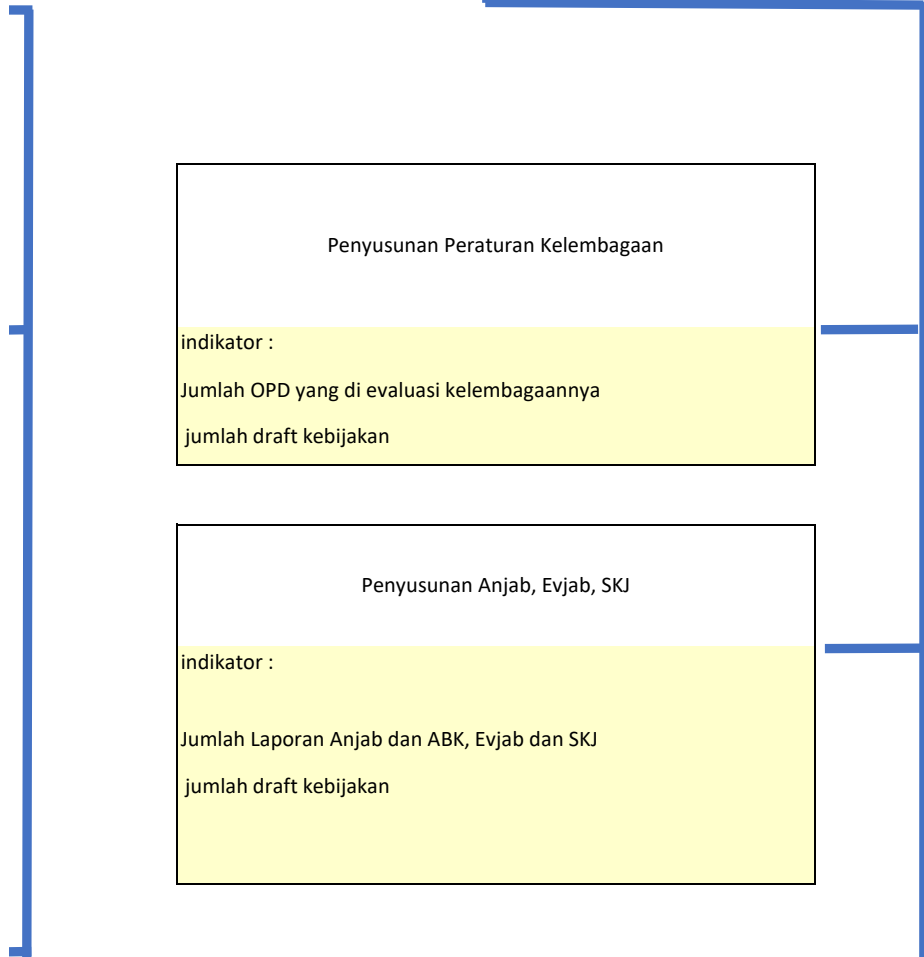
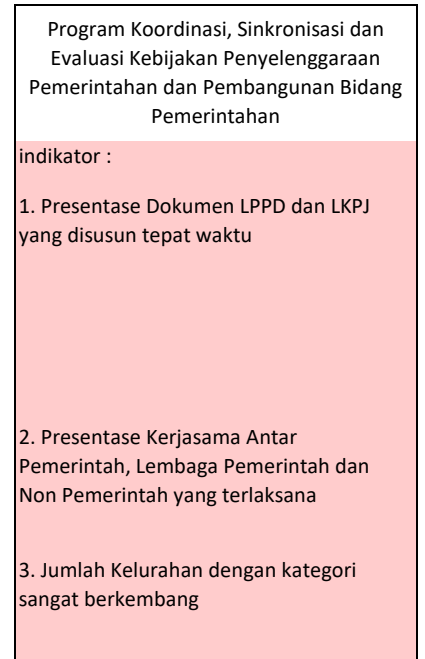
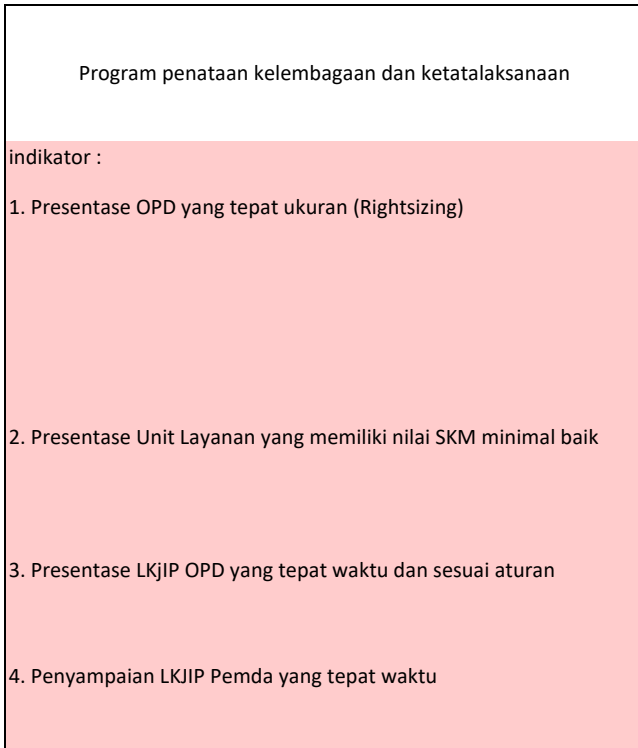
Nilai IKM Pemda

Nilai LPPD

Asisten Pemerintahan

Nilai SAKIP

Nilai LPPD



Kegiatan Tata Laksana

indikator :

Prosentase OPD yang mempunyai peta Probiz
jumlah draft kebijakan
Jumlah OPD yang SOP nya sesuai dengan peta Probis

Kegiatan Pelayanan Publik

indikator :

Jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetisi inovasi
jumlah draft kebijakan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan AKIP dan LKjIP

indikator :

Jumlah LKjIP PD yang disusun tepat waktu dan sesuai ukuran

Kegiatan Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi

indikator :

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama

Jumlah Rekomendasi hasil Apeksi yang ditindaklanjuti

Jumlah Kerjasama / PKS yang difasilitasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan

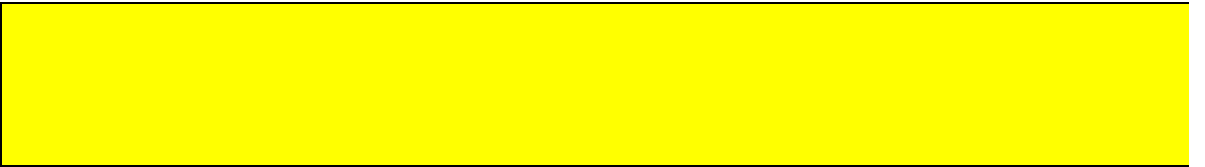
Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas perangkat Kecamatan/Kelurahan
Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Lomba Kelurahan

Jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

kuntabel



Presentase PBJ yang diproses oleh ULP



Presentase PBJ yang diproses oleh ULP

Prosen





Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan

indikator

1. Presentase PBJ yang diproses
2. Presentase pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik
3. Prosentase pengadaan barang dan jasa bermasalah yang diselesaikan

Program K Evaluasi Pemerintahan Bida

indikator :

1. Tingkat ke regulasi Good Kota Mojoke
2. Persentase monitoring, c ditindaklanju
3. Jumlah ket

Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

indikator :

Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan oleh ULP

Kegiatan Ana

indikator :

Jumlah kajian

Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPRA)

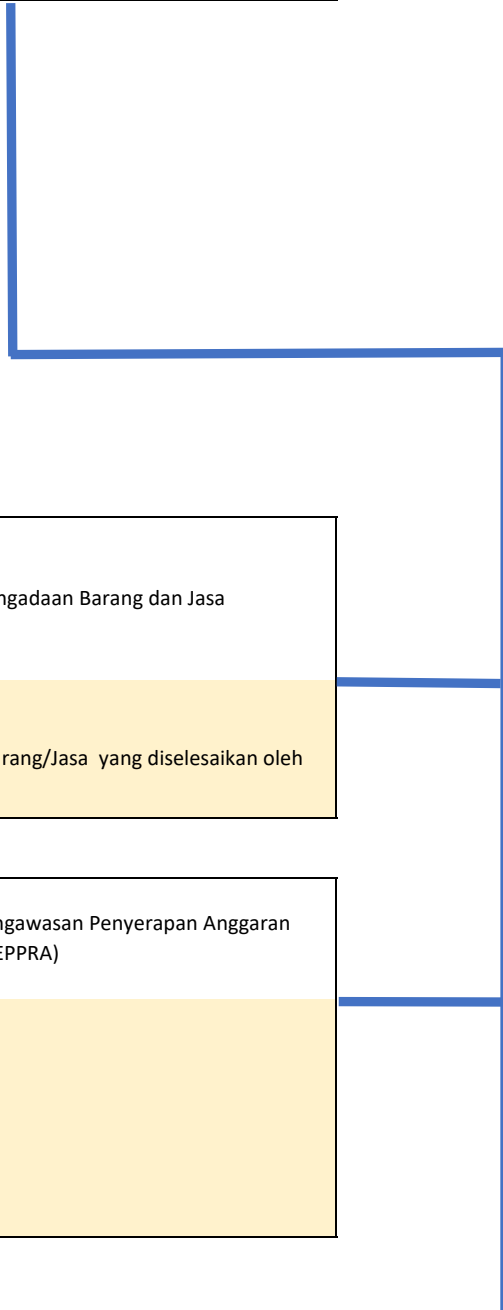
indikator :

Jumlah Laporan

Kegiatan Sistem dan Pengawas

indikator :

Jumlah kajian



Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPRA)

indikator :

Jumlah Laporan

Kegiatan Sistem dan Pengawasan Pere

indikator :

Jumlah kajian

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah

indikator

Jumlah Buku Juknis

Kegiatan Sistem dan Pengawasan

indikator :

Jumlah kajian

Penyelenggaraan LPSE

indikator

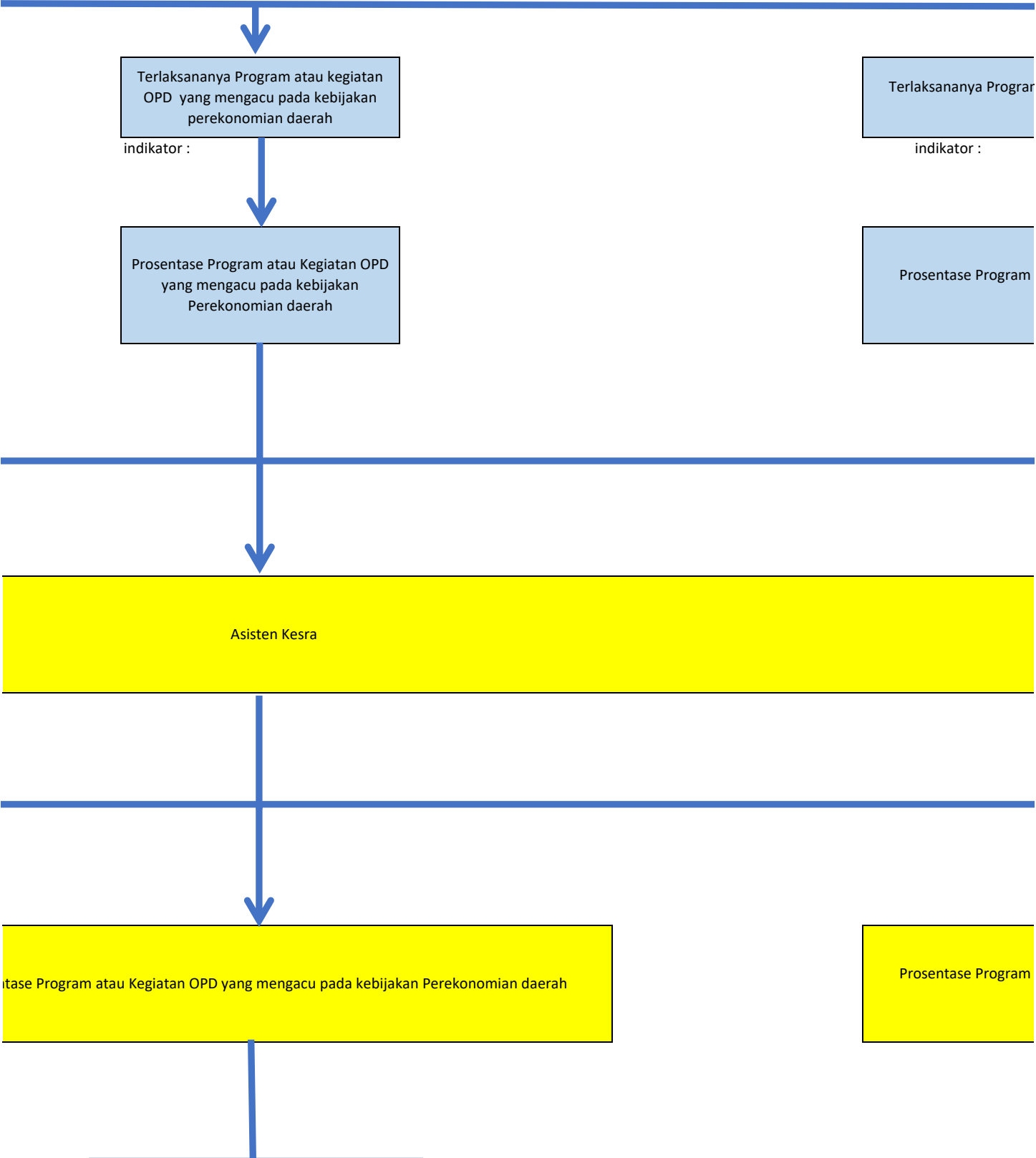
Presentase layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan

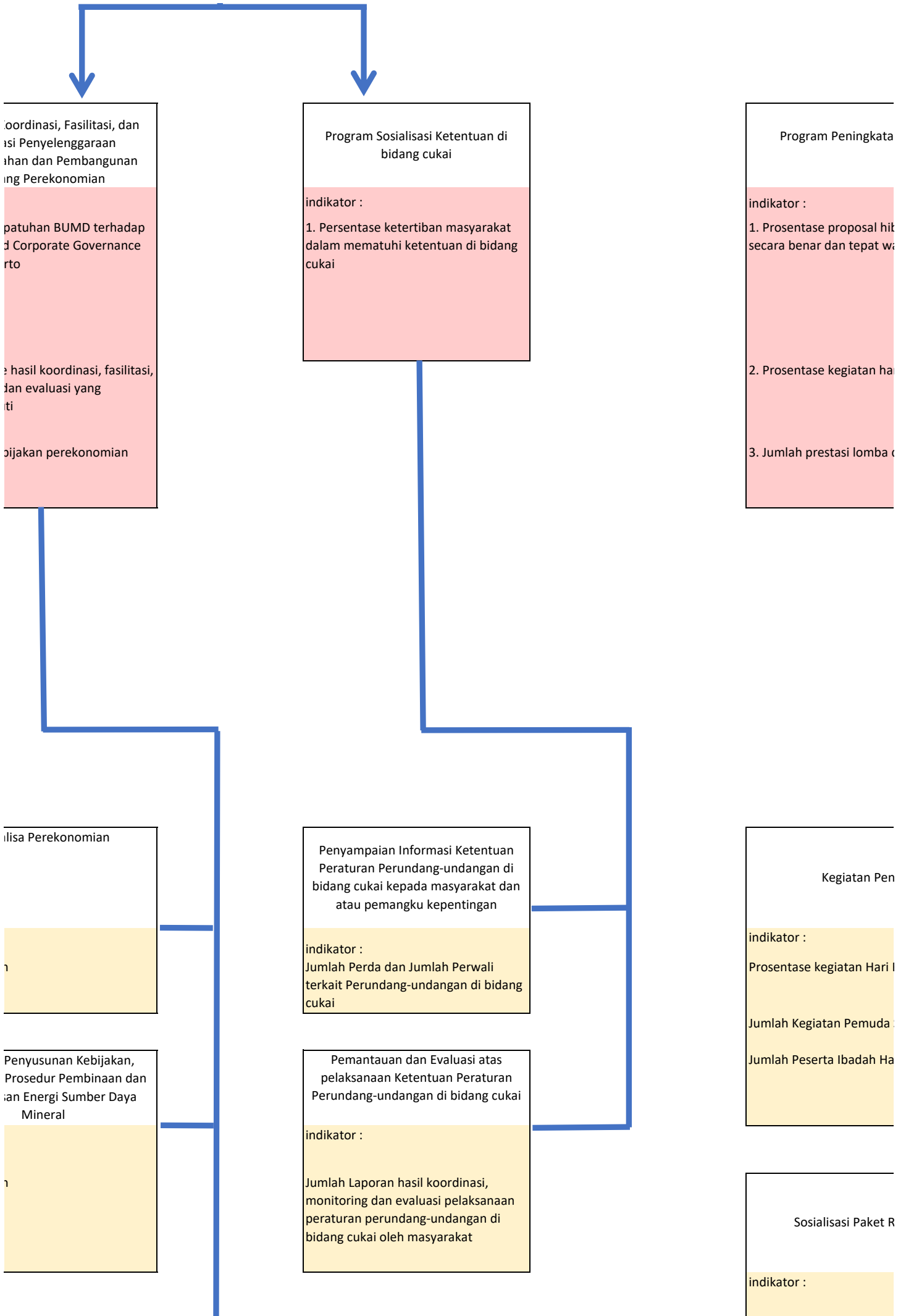
Pendampingan /Advokasi/Probity proses pengadaan barang dan jasa

indikator

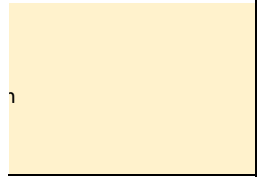
Jumlah pengadaan barang dan jasa bermasalah yang diberikan rekomendasi

Presentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada LPSE, website resmi Pemkot, website resmi OPD dan papan pengumuman kantor

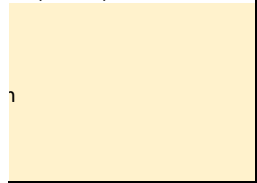




Penyusunan Kebijakan,
Prosedur Pembinaan dan
Pengembangan Potensi
Ekonomian Daerah



Penyusunan Kebijakan,
Prosedur Pembinaan dan
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)



Prosentase proposal hibah
secara benar dan tepat wa

MT

indikator :

Jumlah prestasi lomba di t

Jumlah Peserta Haul yang

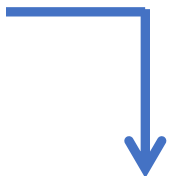
Jumlah tenaga keagamaan



n atau kegiatan OPD yang mengacu pada kebijakan kesejahteraan rakyat



atau Kegiatan OPD yang mengacu pada kebijakan kesejahteraan rakyat



atau Kegiatan OPD yang mengacu pada kebijakan kesejahteraan rakyat





n Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan
Pembinaan Keagamaan

ah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi
aktu

ri besar keagamaan difasilitasi

di bidang keagamaan

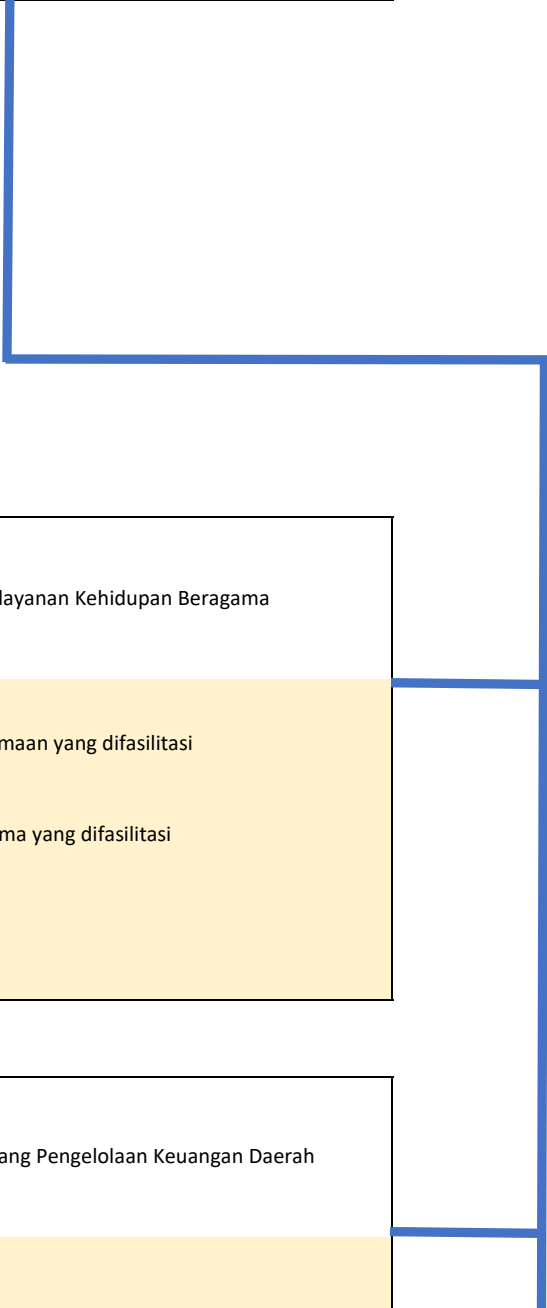
ingkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Besar Keagamaan yang difasilitasi

Seluruh Agama yang difasilitasi

ji difasilitasi

egulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



1 dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi
aktu

Q Tingkat Regional dan Nasional

bidang keagamaan

difasilitasi

1 yang difasilitasi

